



Dewan Usulkan Penguatan UPT Malioboro

UMBULHARJO (MERAPI) - Pengelolaan kawasan Malioboro dinilai akan lebih efektif dengan memperkuat kapasitas Unit Pelaksana Tugas (UPT) Malioboro. Hal itu menanggapi rencana Pemda DIY membentuk sekretariat bersama Malioboro yang melibatkan lintas instansi pemerintah.

"Kami nilai kurang efektif rencana Pemda DIY yang membentuk sekretariat bersama (sekber) Malioboro jika tidak ada tugas pokok dan fungsi (tupoksi) yang jelas. Akan lebih baik peran UPT Malioboro diperkuat," Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta Nasrul Khoiri, Senin (21/8).

Sejak awal tahun ini, pihak-

nya sudah meminta Pemkot Yogyakarta untuk menambah dan memperkuat kewenangan UPT Malioboro. Pasalnya kewenangan UPT Malioboro selama ini hanya sebatas pemeliharaan kawasan Malioboro, sehingga belum mampu menyelesaikan berbagai masalah. Misalnya untuk menambah kamera CCTV tidak bisa dilakukan UPT Ma-

lioboro karena tidak memiliki kewenangan kuasa pengguna anggaran.

"Padahal selama ini jika terjadi persoalan di Malioboro, yang disorot UPT Malioboro. Padahal tidak semuanya tupoksi UPT," paparnya.

Dia menilai beberapa tupoksi di kawasan Malioboro masih tumpang tindih. Misalnya pengelolaan di depan Pasar Beringharjo menjadi kewenangan Dinas Perindustrian dan Perdagangan serta depan Pasar Sore sampai Titik Nol diampu Pam Budaya di bawah Satpol PP.

Selain itu saat Pemda DIY akan membangun jalur pedes-

trian di Malioboro UPT Malioboro juga tidak bisa menjelaskan rencana pembangunan dan waktu pengerjaan.

Dia berpendapat banyak komunikasi dan koordinasi dengan DIY tidak berjalan baik. Namun pihaknya mengapresiasi kinerja UPT Malioboro yang cukup baik meski kapasitasnya terbatas. "Untuk memperkuat peran UPT Malioboro, maka jabatan kepala UPT juga harus dinaikkan sehingga mampu melakukan komunikasi koordinasi dengan instansi yang lebih tinggi seperti provinsi," tambah Nasrul.

Kepala Dinas Pariwisata

Kota Yogyakarta Yunianto Dwi Sutono yang mengampu UPT Malioboro mengatakan, belum pernah diajak komunikasi dengan DIY terkait rencana pembentukan Sekber Malioboro. Dia juga mengakui selama ini ada hambatan UPT Malioboro untuk berkomunikasi dengan DIY. "Karena bukan kewenangan UPT Malioboro mengambil kebijakan strategis," imbuh Yunianto.

Ketugasan UPT Malioboro, kata dia, tidak hanya dalam pemeliharaan, tapi juga dalam penertiban misalnya pedagang kaki lima dan parkir ilegal di kawasan Malioboro. (Tri)-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Segera	Untuk Diketahui
2. UPT. Malioboro			

Yogyakarta, 02 Oktober 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005